25 AUG 1998
PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
650

Penasihat : HG Rorimpandey
Pemimpin Umum : Dr Albert Hasibuan SH
Pemimpin Redaksi : Dr Sutarno
Wakil Pemimpin Redaksi : Djomentang Sirait, Ilonar Simorangkir
Alamat Redaksi : Jl Dewi Sartika 136-D, Jakarta 13630, Tromol Pos 280 JKT dan 015 JNG. Telepon (021) 801-4077 (16 saluran), Faks (021) 800-7262, 801-6131, E-Mail: pembaru@indo.net.id
Penerbit: PT Media Interaksi Utama Telepon 800-6987 (12 saluran), 801-3208 (18 saluran)
SIUPP No: 224/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1987 tanggal 29 Januari 1987
Nomor ISSN: 0215-4617
"Cyber News" : http://www.SuaraPembaruan.com/
Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Sinar Agape Press

HARIAN UMUM

SUARA PEMBARUAN

Memperjuangkan Harapan Rakyat Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

Pemimpin Perusahaan : Soedarjo
Wakil Pemimpin Perusahaan : Sasongko Soedarjo MBA
Manajer Sirkulasi : Perry Simorangkir
P/s. Manajer Iklan : Adriarto Budhiardjo
Bagian Iklan: Jl Gajah Mada 16, Telepon (021) 6322219 (hunting) 634-8933 Faks 6322216 dan Jl Dewi Sartika 136-D Cawang, Jakarta 13630 Tel 800-6987 (12 saluran) & 801-3208 (18 saluran) Pes 102 & 103, 800-8007 Faks 800-2487
Rekening: Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jakarta Kota, Rek Giro 00.86.006.441 Bank Niaga Jl Gajah Mada 18, Rek Giro: 011-35734, Bank Ina Perdana, Jl Raya Pasar Minggu 1-2, Rek No: 00014.2.11.01.76, BRI Cab Oasis, Rek Giro: 3145-11517, BCA-Cab Jatinegara Rek Giro: 005-30-40141-1
Harga langganan: Rp 35.000/bulan. Terbit 7 kali seminggu.
Luar Kota Per Pos Rp 111.750/triwulan bayar di muka.
Telepon Pengaduan dan Berlangganan: 800-8101, 800-7987, 801-5886 dan 801-3208 (18 saluran), Pes 504; Faksimile 801-1036.

SELASA, 25 AGUSTUS 1998 | TERBIT SORE 12 HALAMAN | HARGA ECERAN RP 1.500 | TAHUN XII NO. 4057

Dijual, Kediaman Duta Besar Thailand Di London Dan Wina

Bangkok, 25 Agustus

Kementerian Luar Negeri Thailand berencana menjual sejumlah properti milik perwakilan-perwakilannya di luar negeri, termasuk kediaman kediaman duta besar di London dan Wina, dalam upaya mengumpulkan dana, demikian sebuah laporan, Selasa.

Properti-properti yang ditawarkan itu termasuk kediaman Duta Besar Thailand di luar kota London, dengan nilai 7,1 sampai 9,5 juta dolar. Kemudian kediaman duta besar di Wina yang bersebelahan dengan Vienna Woods of Vienna, dengan harga 4,8 sampai 7,1 juta dolar, demikian harian *The Nation*. Juru bicara Kemlu Kobsak Chutikul mengatakan kepada harian itu penjualan properti-properti tersebut sangat dibutuhkan untuk mengisi kocek pemerintah, yang tahun ini akan mengalami kesulitan karena penerimaan pajak menyusut.

Kobsak menambahkan Kemlu juga mempertimbangkan mengundang beberapa developer untuk membangun sebuah gedung pencakar langit di komplek kedutaan Thailand di Singapura, yang terletak di kawasan bisnis Orchard Road.

Sementara itu dari Bangkok diberitakan hari Selasa (25/8), Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Thailand akan mencapai titik terendah pada akhir tahun ini dengan "pemulihan moderat" diperkirakan terjadi pada 1999.

"Kerangka kerja ekonomi makro yang dimodifikasi memperkirakan bahwa ekonomi akan mencapai titik terendah pada akhir tahun, yang akan menjadi landasan pemulihan pertumbuhan pada 1999," demikian prediksi IMF dalam *letter of intent* terbaru dengan Thailand, yang salinannya disiarkan harian *Bangkok Post*.

Meski demikian, IMF memprediksikan ekonomi Thailand akan berkontraksi 7 persen tahun ini dan memperingatkan bahwa pemulihan awal pada 1999 sangat tergantung pada "dukungan situasi di kawasan ini." Berdasarkan *letter of intent* kelima itu, yang akan disetujui oleh kabinet Selasa ini, bank internasional mendukung rencana Thailand baru-baru ini untuk melakukan reformasi finansial secara struktural dan menata kembali utang swasta sehingga kalangan bisnis bisa sedikit bernapas.

Rencana pemulihan Thailand itu memerlukan persetujuan IMF sebelum lembaga itu meneruskan pencairan tahap selanjutnya dari paket bantuan sebesar 17,2 miliar dolar.

Setelah menerima persetujuan kabinet, *letter of intent* kelima itu masih harus mendapat persetujuan dari dewan IMF. Thailand telah menyerap 10 miliar dolar dari paket penyelamatan IMF yang ditandatangani setahun lalu. (DPA/K-6)

Pembaruan/Jais Montesori S

MENENTANG KONGRES PDI – Belasan ribu pengunjuk rasa penentang pelaksanaan Kongres PDI di Palu berusaha menerobos barisan petugas keamanan yang menghalangi mereka memasuki Asrama Haji tempat berlangsungnya Kongres PDI pimpinan Soerjadi. Para pendukung PDI Perjuangan itu akhirnya tidak berhasil menemui Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan itu.

Mendagri Syarwan Hamid:

Megawati Kekuatan Riil Yang Pengaruhnya Besar

Semarang, 25 Agustus

Mendagri Syarwan Hamid menegaskan, mari bersama-sama berdoa agar PDI dapat segera bersatu kembali. Persoalan PDI memang dilema. Pemerintah berpikir asas legalitas, dengan melihat Soerjadi memiliki legalitas dan sudah ikut Pemilu. Tetapi sebuah kenyataan pula, Megawati merupakan kekuatan riil yang pengaruhnya besar. Di sinilah letak dilemanya.

"Pemerintah berpendapat, alangkah baiknya bila kedua belah pihak bisa bersatu, sehingga dilema dimaksud akan hilang. Soalnya, jika mengikuti proses hukum, waktunya akan sangat panjang," kata Mendagri Syarwan Hamid ketika ditanya wartawan tentang masalah PDI di Semarang, Senin (24/8).

Ia sendiri bersama rombongan Depdagri Selasa (25/8) dini hari, akan berangkat ke Palu melalui Bandara A Yani Semarang, mewakili Presiden membuka Kongres PDI pimpinan Soerjadi. Sebelumnya, Senin (24/8), Mendagri melantik Asospol Kassospol ABRI Mayjen TNI Mardiyanto sebagai Gubernur Jawa Tengah 1998-2003.

Sementara itu, salah seorang deklarator fusi PDI, Sabam Sirait, mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi peristiwa rekayasa kongres PDI dengan mencampuri urusan interen partai pada kongres yang digelar PDI Soerjadi di Palu, Sulawesi Tengah.

Berbicara kepada wartawan hari Senin (24/8) di Jakarta, Sabam mengatakan, pada Kongres di Medan, para deklarator telah mengirim surat kepada pemerintah, mengingatkan, kongres tersebut melanggar Anggaran Dasar partai.

Kalau pemerintah memberikan restu pada kongres yang melanggar aturan, akan membuat semakin banyak peraturan yang dilanggar. Tindakan seperti itu bukan hanya akan merugikan PDI, tetapi juga bangsa Indonesia. Dan hal itu terbukti sekarang ini.

Sabam mengatakan, pihaknya ragu-ragu bahwa Kongres di Palu akan menghasilkan keputusan pembubaran dari DPP PDI hasil kongres dan memilih bergabung dengan Megawati. "Tetapi kalau itu terjadi, kami akan berterima kasih. Tetapi saya tidak mau berandai-andai itu akan terjadi," katanya.

Tokoh PDI lainnya, Yahya Nasution mengatakan, ia melihat ada kemungkinan besar kongres di Palu akan memilih Megawati sebagai pemimpinnya.

Tentang apakah Megawati akan menerima keputusan seperti itu, Yahya mengatakan, sampai sekarang Megawati tetap berpendapat, dirinya adalah pemimpin PDI yang sah. Oleh karena itu, katanya, jalan yang terbaik bagi kongres di Palu adalah menghasilkan keputusan yang isinya mengembalikan kepemimpinan PDI pada Megawati.

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 7-9)

Kemal Idris: Ajukan Prabowo Ke Mahkamah Militer

Jakarta, 25 Agustus

Berbagai tanggapan yang dikumpulkan mengenai keputusan yang dijatuhkan oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto atas diri Letjen TNI Prabowo Subianto umumnya mengharapkan agar nanti ia dan dua perwira lain yaitu Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil) karena mereka mengaku telah melakukan penculikan terhadap 9 aktivis.

Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris mengatakan, Letjen Prabowo Subianto seharusnya diajukan ke Mahkamah Militer sebab dalam penyelidikan dia sudah mengaku salah menganalisa perintah BKO (Bawah Kendali Operasi) dan mengaku telah menculik sejumlah aktivis.

Dalam putusan yang dibacakan Jenderal TNI Wiranto Senin (24/8) siang, Letjen Prabowo diberhentikan dari jabatannya; sedangkan Mayjen Muchdi dan Kol. Chairawan tidak boleh menduduki jabatan struktural ABRI, tetapi masih menjadi anggota ABRI.

"Itu saya tidak bisa mengerti *kok* enak saja. Kalau jadi perwira berbuat salah *kok* cuma diberhentikan. Buat saya itu menjadi tanda tanya besar kenapa begitu," kata Kemal Idris kepada *Pembaruan* di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

"Saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya. Saya menganggap itu keputusan gila. Saya tidak bisa setuju dengan keputusan itu. Ini menunjukkan keraguan-raguan pimpinan, apakah karena dia mantu mantan presiden. *Kok* begitu," tandas Kemal.

Lebih jauh purnawirawan jenderal berbintang tiga ini mengatakan, mereka menjalani ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan harus di-Mahmilkan. Apalagi sudah mengaku salah kok pimpinan masih ragu-ragu bertindak. Ini kan aneh.

Kalau begitu, tambah Kemal, seolah-olah perwira-perwira ABRI tidak tersentuh hukum, boleh berbuat semau-maunya. Kan tidak begitu seharusnya. Mereka khan juga pejabat sehingga mereka harus tunduk kepada hukum. Kelihatannya hukum hanya berlaku untuk orang rendah, orang berpangkat tinggi tidak perlu ada hukum, cuma di Indonesia yang begitu.

Tidak Sejalan

Sementara itu, di tempat terpisah Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Munir kepada wartawan di Jakarta Senin (24/8) menyatakan sanksi administratif terhadap ketiga perwira itu tidak sejalan dengan komitmen pimpinan ABRI yang menyatakan akan mengusut tuntas kasus penculikan. "Rekomendasi DKP sekaligus membuktikan bahwa ABRI mengedepankan strategi defensif dengan melindungi para penculik aktivis dari bentuk-bentuk pertanggung-jawaban," kata Munir.

Kontras yang sejak awal berulangkali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan DKP kembali menegaskan, DKP menempatkan posisi hukum berada di tempat yang tidak selayaknya. Seharusnya semua tersangka yang patut diduga terlibat dalam kasus penculikan segera diperiksa dan dibawa ke pengadilan.

Dalam kesempatan itu Kontras kembali mendesak pemerintah dan pimpinan ABRI untuk memeriksa Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen Jacky Anwar Makarim, Polda Metro Jaya, Korantil Duren Sawit, Kodim Jakarta Timur dan pihak-pihak lainnya yang patut diduga terlibat penculikan.

(Bersamb. ke hal. 11 kol.7-9)

Pembaruan/Charles Utug

KEPUTUSAN DKP – Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Senin (24/8) siang memberikan keterangan pers mengenai keputusan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai terperiksa Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kol. Inf. Chairawan. Dalam keterangan di Mabes ABRI Jakarta itu hadir Ketua DKP Kasad Jenderal TNI Subagyo HS (kiri) dan para anggota DKP yang lain.

TUBUH PERLU
MULTIVITAMIN & MINERAL LAINNYA
DISAMPING VITAMIN B KOMPLEKS DAN C
PERCAYAKAN KEBUTUHAN MULTIVITAMIN ANDA PADA
hemaviton
Hidup sehat, niknat bahagia

Suu Kyi Akhiri Protesnya

Yangon, 25 Agustus

Tokoh prodemokrasi Myanmar yang juga peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, karena kesehatannya yang memburuk, akhirnya kembali ke rumahnya setelah bertahan melakukan protes 13 hari di dalam mobilnya. Protes damai ini dilakukan karena dirinya dilarang pemerintahan junta militer untuk menemui para pendukungnya di luar kota Yangon.

Para tokoh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi mendesaknya untuk mengakhiri aksi protes mengingat kesehatannya yang terus memburuk dalam beberapa hari ini.

Tim dokter Suu Kyi, setelah diizinkan untuk memeriksanya, mengumukakan, tokoh pejuang ini menderita gangguan ginjal, tekanan darah rendah, pening, dan gangguan sistem saluran kencing.

Para pejabat pemerintah hari Senin menjelaskan bahwa Suu Kyi kembali ke Yangon atas kehendaknya sendiri, didampingi dua dokter pribadinya yang ikut serta di dalam minibus itu.

Para tokoh partai NLD meminta Suu Kyi untuk mengakhiri aksi protesnya ketika muncul tekanan politik terhadap rezim militer oleh 200-an mahasiswa di Yangon yang merupakan demonstrasi anti pemerintah pertama dalam dua tahun ini. Kemunculan mahasiswa akhirnya membubarkan diri ketika truk tentara datang. Namun tidak dilaporkan adanya mahasiswa yang ditangkap.

Pada hari yang sama (Senin, 24/8), sebagaimana dikemukakan pihak NLD, Menteri Dalam Negeri bertemu dengan dua anggota komite eksekutif pusat partai tersebut.

Menteri Tin Hlaing menyampaikan permohonan dengan Ketua NLD Aung Shwe. Kemudian, Aung Shwe mengirim dua anggota komite pusat untuk menggantikannya.

NLD hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak bertemu dan "menyatakan penghargaan atas sikap masing-masing." Pertemuan seperti ini, antara tokoh NLD dan pihak militer, merupakan sesuatu yang amat jarang.

Sebelum hari Senin, Suu Kyi (53) terakhir kali dipergok oleh dokter pribadinya hari Jumat (21/8) di atas sebuah jembatan, 32 kilometer di luar kota Yangon, di mana mobilnya dihentikan sejak 12 Agustus. Pemerintah menolak kunjungan dokter bagi Suu Kyi pada hari Sabtu dan Minggu.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Senin, NLD menyebutkan, sejak saat itu rezim militer menolak untuk mengizinkan para dokter maupun Ketua Partai Aung Shwe untuk mengunjungi Suu Kyi.

"Sejak kesehatannya memprihatinkan, para anggota dan simpatisan NLD meminta dengan sangat agar Daw Aung San Suu Kyi kembali ke Yangon," demikian bunyi pernyataan tersebut. *Daw* merupakan nama kehormatan untuk Suu Kyi.

Pekan lalu, pihak partai meminta agar pemerintah melepaskan anggota partai yang ditahan sejak Mei lalu sebagai syarat untuk mengakhiri aksi protes diam yang dilakukan pemimpin mereka. Namun, hingga hari Minggu, para tokoh partai menyatakan, tak seorang pun anggotanya yang dibebaskan.

NLD juga mematuhi batas waktu Jumat lalu bagi pemerintah untuk melakukan sidang parlemen yang terpilih dalam pemilu 1990. Dalam pemilu tersebut, NLD meraih 82% dari jumlah kursi yang ada di parlemen. Namun, pihak militer menolak untuk mengakui [illegible] tersebut.

Karena tuntutan tentang batas waktu itu tidak dipenuhi, pihak NLD mengancam untuk mengadakan sidang parlemen [illegible] pemerintah. Pihak rejim militer sendiri menyebut tuntutan itu sebagai tindakan ilegal. (AFP/S-23)

Karyawan Bank Beku Operasi Masih Digaji Sampai September 1998

Jakarta, 25 Agustus

Status hukum seluruh karyawan Bank Beku Operasi (BBO) sampai akhir September 1998 tidak berubah. Dengan demikian, seluruh karyawan akan mendapat gaji untuk Agustus dan September 1998 seperti biasa.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku kuasa direksi dalam keterangan tertulis Senin, menyatakan, pada prinsipnya, seluruh karyawan bank wajib tetap bekerja seperti biasa. Namun, mengingat telah dibekukannya kegiatan usaha bank, maka Tim Pemberesan masing-masing bank dalam waktu secepatnya akan memutuskan untuk merumahkan sebagian karyawan dan menetapkan sebagian karyawan lainnya untuk tetap bekerja seperti biasa.

Setelah September 1998, Tim Pemberesan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk sebagian karyawan. Bagi karyawan yang tidak terkena PHK akan bertugas membantu proses pemberesan bank.

Sehubungan dengan hal itu, karyawan yang tidak terkena PHK akan mendapat gaji dan fasilitas. Dalam hal tugas, Tim Pemberesan telah selesai atau pada waktu lain yang ditentukannya, karyawan tersebut akan mendapat uang kompensasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan seperti berikut.

Bagi karyawan masing-masing bank yang terkena PHK, akan memperoleh kompensasi sebesar dua kali (2X) kompensasi yang ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) yang besarnya akan dikonsultasikan dengan Departemen Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut.

Untuk uang kompensasi yang jumlahnya sebesar satu kali (1X) PMTK, dibayarkan oleh masing-masing bank dengan bantuan keuangan dari BPPN apabila diperlukan. Kemudian, untuk uang kompensasi yang jumlahnya sebesar satu kali (1X) PMTK lainnya, BPPN selaku kuasa direksi masing-masing bank akan meminta pemegang saham utama masing-masing bank untuk membayarnya.

Dengan adanya keterangan ini, BPPN mengharapkan agar seluruh karyawan bank tetap tenang dan menjaga ketertiban serta keamanan bank agar proses pembayaran dana nasabah dan pengamanan aset bank dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Keterangan BPPN lainnya menyebutkan, walau terjadi pembekuan terhadap beberapa bank, kesempatan baru di dunia perbankan masih terbuka. Karena beberapa bank dengan kualitas baik mendapat manfaat dengan memperoleh nasabah baru yang menghendaki pelayanan lebih baik. Kebutuhan ini menunjukkan adanya kesempatan baru untuk melakukan ekspansi kantor cabang dan tenaga kerja.

Beberapa bank seperti Bank Lippo, Bank Bali dan Bank BNI memberi sinyal bahwa mereka akan memperkuat jaringan kerja dan meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

Sepihak

Ketua Tim Karyawan BBO, Felix Rahardjo, kepada *Pembaruan* mengatakan, tindakan BPPN dalam penentuan nasib karyawan dilakukan secara sepihak. "Penutupan bank bukanlah merupakan kesalahan karyawan BBO, sehingga setiap langkah PHK harus berdasarkan kesepakatan karyawan BBO," kata Felix.

Ditambahkan, PHK yang nantinya akan dilakukan setelah September 1998 adalah tindakan sepihak, karena proses PHK harus melalui perundingan antara BPPN dengan karyawan BBO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. "Jika tetap melakukan tindakan sepihak maka ini merupakan tindakan pemberhentian sepihak terhadap karyawan BBO," kata Felix.

Nasabah Besar

Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita mengatakan, kebijakan pemerintah untuk tidak memasukan BCA dan Bank Danamon ke dalam kreteria Bank Beku Operasi (BBO) berdasarkan pertimbangan besarnya jumlah nasabah di kedua bank swasta tersebut.

Ia menjelaskan, pemerintah menjamin kedua bank tersebut bisa mengembalikan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan pemerintah.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus memperhatikan kepentingan nasabah kedua bank tersebut, yang masing-masing BCA sebanyak 6 juta orang dan Bank Danamon 2 juta orang.

"Bila kedua bank tersebut di-B-BO-kan akan berakibat kerugian yang cukup besar, karena akan menyerap biaya cukup besar," katanya.

Untuk menghindari pengeluaran yang cukup besar itu, menurut dia, pemerintah mengupayakan

(Bersamb. ke hal. 3 kol. 1-4)

ANDA BUTUH PERLINDUNGAN
"HURU-HARA"
Hubungi :
(021) 391 8848
LG SIMAS Insurance

21 Kerangka Jenazah Di Aceh Masih Terus Diperiksa

Jakarta, 25 Agustus

Reserse Polres Aceh Utara bekerja sama dengan tiga dokter forensik dari Rumah Sakit Lhokseumawe dipimpin dokter Mulia sampai Selasa (25/8) siang, masih terus memeriksa 21 kerangka manusia yang diduga sebagai korban pembantaian dan ditemukan di beberapa pemakaman di daerah ini.

Keterangan yang diperoleh dari Polres Aceh Utara menyebutkan, dalam pemeriksaan cermat yanmg dilakukan di Markas Polres Aceh Utara ikut pula menyaksikan Kapolres Letkol Pol Drs Iskandar Hasan serta beberapa anggota Reserse lainnya. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan penyebab kematian korban apakah dianiaya dengan benda tumpul ataupun kena tembak senjata.

Kapolres menyebutkan, dari keseluruhan kerangka yang ditemukan itu diduga mereka meninggal akibat tindak kekerasan. Dugaan ini berdasarkan data yang didapat dari hasil penggalian dimana beberapa mayat dalam keadaan terikat tangannya dengan tali rafia. Selain itu terdapat mayat yang matanya ditutup dengan kain hitam.

Untuk memastikan keterangan lebih jauh lagi, maka tim dokter forensik baik itu dari Polda Aceh, Polda Sumatera Utara dan RS Lhokseumawe diturunkan bersama-sama. Sementara masyarakat yang merasa pernah kehilangan keluarga dimintakan bantuannya untuk dapat memberikan ciri-ciri mereka sehingga diharapkan kerangka mayat yang ditemukan itu selain bisa diidentifikasi penyebab meninggalnya juga diketahui identitasnya.

15 Ribu Anak Yatim

Sementara itu, Sekjen Komnas HAM Prof Baharuddin Lopa mengatakan, pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh selama kurun waktu 1989-1998 menyebabkan 15 ribu-20 ribu anak penduduk Aceh kehilangan orang tuanya. Korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan berjumlah 781 orang dan korban hilang mencapai 163 orang. Komnas juga mencatat terjadinya 102 kasus perkosaan selama kurun waktu itu.

Hal itu dikemukakan Lopa kepada wartawan di Jakarta, hari Senin (24/8). Data-data tersebut merupakan hasil pantauan tim Komnas HAM setelah melakukan kunjungan di Aceh sehari sebelumnya.

Komnas yang juga mendapat catatan dari sejumlah LSM Aceh menyatakan, bahwa jumlah kuburan massal di Aceh adalah 9 buah. Selain kuburan massal yang menjadi kuburan mayat masyarakat Aceh, Komnas mencatat adanya sejumlah kuburan perorangan yang berteburan di sejumlah desa.

Tim Komnas yang terdiri dari Lopa, Koesparmono Irsan, Soegiri dan M Salim secara khusus menyaksikan pembongkaran kuburan di Kuala Tan, Kembang Tanjung, Kabupaten Pidei. Di kuburan yang digali tanggal 2 Agustus 1998 itu ditemukan 2 jenazah.

Komnas juga menemukan sejumlah tulang-tulang jari tangan manusia yang berasal dari dua jenazah di halaman Rumah Geudong (tempat penganiayaan-**Red**) di Bili Arong Kecamatan Tiga,

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 3-4)

8 Muka Baru Perkuat "Panzer" Hadapi Malta Dan Romania

Frankfurt, 25 Agustus

Pelatih kepala tim "Panzer" Jerman, Berti Vogts, memanggil delapan muka baru pada masa transisi pembentukan tim nasional Jerman. Kemampuan kedelapan pemain baru itu akan diuji Vogts dalam pertandingan persahabatan melawan Malta dan Romania, 2 dan 5 September mendatang.

"Saya benar-benar harus melakukan perubahan total untuk membangun kembali tim nasional Jerman yang baru. Kami memiliki obyektivitas yang baru untuk menjadikan Jerman sebagai tim yang berkualitas, khususnya untuk mempertahankan gelar juara Piala Eropa 2000 yang berlangsung di Belanda dan Belgia," kata Vogts yang mengumumkan tim nasionalnya di Frankfurt, Jerman, Senin (24/8).

Tim nasional Jerman yang baru ini, benar-benar telah mematahkan sesuatu yang telah menjadi sejarah dalam tim nasional Jerman, yaitu kontinuitas dalam pembentukkan tim. Sebelumnya, Jerman selalu mengandalkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman, terutama mereka yang pernah bermain di tingkat internasional. Tetapi kali ini tidak, dalam tim Jerman, tidak ada lagi nama pemain yang pernah memperkuat Jerman pada Piala Dunia 1990 dan hanya dua pemain yang saat itu memperkuat Jerman di arena Piala Eropa 1996.

Delapan pemain baru yang akan menjadi kekuatan baru tim juara dunia tiga kali ini adalah Mustafa Dogan yang bermain di klub Fenerbache Istambul (Turki), Marko Rehmer (Hansa Rostock), Oliver Neuville (Rostock), Michael Ballack (Kaiserlautern), Marco Reich (Kaiserlautern), Stefan Beinlich (Bayer Leverkusen), Paulo Rink (Leverkusen) dan Christian Nerlinger (Borussia Dortmund).

Tim ini juga diperkuat oleh 10 dari 22 pemain yang tersisa di arena Piala Dunia 1998. Sedangkan sembilan pemain lainnya dinilai sudah harus gantung sepatu atau

(Bersamb. ke hal. 11 kol. 5-6)

Investasi Lebih Pasti !
DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH
SUKU BUNGA 59% p.a.*
SEMUA SIMPANAN ANDA DIJAMIN PENUH OLEH PEMERINTAH
Hubungi Kantor Cabang BDN Terdekat
BDN
BANK DAGANG NEGARA

JANGAN LEWATKAN

EKONOMI - halaman 4

Badan hukum asing saat ini, dapat mendirikan bank umum di Indonesia dengan bekerjasama BUMN atau badan hukum Indonesia. Mengenai adanya pemerintah [illegible] pihak asing, menurut Markus Bambang Subianto, tidak [illegible]. Sebelumnya kepemilikan pihak asing, maksimum 49 persen saja.

OLAHRAGA - halaman 9

Tokoh Tinju Syamsul Anwar Harahap, [illegible] dapat dikatakan di bidang penggemar tinju di Indonesia. Namun, [illegible] pelatih, juga saat ini sering tampil di TV sebagai komentator pertandingan tinju. Apa gagasan Syamsul [illegible] tentang perbinjuan kita?